

## MENPORA Harus Berdayakan Olahraga Berdimensi Luas

Oleh: Agus Mahendra

SIMPANG-SIURNYA pandangan dan harapan para *stake holders* olahraga terhadap kemunculan kembali Kementerian Pemuda dan Olahraga (MENPORA) pada dasarnya menunjukkan satu hal, yaitu bahwa cara pandang kita terhadap olahraga masih sangat partial dan sarat dengan kepentingan tertentu.

Tengok saja harapan yang mengemuka terhadap isu munculnya kementerian ini. Ada yang berharap bahwa kementerian tersebut harus berupa Departemen Olahraga, ada yang mengusulkan agar kementerian ini lepas dari embel-embel pemuda, dan ada juga yang menitip pesan agar kementerian ini digabung dengan departemen pariwisata. Bahkan terakhir, ada pula yang mengusulkan agar Menpora membawahi KONI.

Apa artinya semua ini? Semua mengindikasikan bahwa cara pandang kita terhadap olahraga masih membedakan secara tegas dan diskrit antara olahraga prestasi dan olahraga non-prestasi. Maksudnya, adanya Menpora hanya dikaitkan dengan bagaimana agar olahraga kita mampu berbicara lebih nyaring di arena internasional, yang juga berarti satu hal, yaitu kementerian olahraga seolah berkewajiban menyediakan dana lebih besar pada pembinaan olahraga prestasi.

Pandangan demikian memang tidak bisa dielakkan manakala kita menengok kembali sejarah perkembangan olahraga kita yang dilontarkan sebagai alat politik bangsa dalam menegakkan postur bangsa yang sudah sekian abad terpuruk oleh penjajahan. Hingga sekarang, sikap *minder* tersebut masih melekat pada para *stake holders* olahraga kita, yang jika berbicara olahraga, selalu dikaitkan dengan bagaimana kita membuktikan diri sebagai bangsa dan negara yang besar dalam dan melalui olahraga.

Akibatnya, olahraga kita terus menerus berada dalam suatu *distance* dari kepentingan masyarakat luas. Tidak banyak orang yang merasakan manfaat olahraga, kecuali segelintir orang yang ada di dalamnya; ya pengurus KONI dan Top Organisasi, para pelatih, dan segelintir atlet yang merasa diri berbakat. Lalu masyarakat luas? Mereka tidak pernah merasakan manfaat dari olahraga yang sering dikibarkan oleh pihak tertentu sebagai kepentingan bangsa dan negara.

Sungguh menjadi sangat artifisial jika para pemuka olahraga menyatakan bahwa olahraga adalah alat pembangunan dan pembentuk karakter bangsa (*nation and character building*). Lha, yang dibentuk karakternya hanya segelintir orang kok. Bagaimana bangsa sebagai sebuah entitas merasa terdidik melalui olahraga kalau yang diperhatikan hanya para atlet saja?

Coba pula tengok kiprah kita dalam berolahraga. Sedemikian besar dana dihabiskan untuk pesta olahraga nasional (PON). Setiap propinsi mengerahkan energi habis-habisan untuk bisa membuktikan diri unggul dari propinsi lain (wujud lain dari kemimpinan kita?). Tetapi apakah PON atau peristiwa olahraga lain tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas? Apakah dengan adanya PON membuat banyak orang terinspirasi untuk semakin giat berolahraga? Apakah PON benar-benar mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat? Apakah PON membuat setiap propinsi berlomba-lomba menyediakan infrastruktur olahraga untuk masyarakat luas? Apakah PON membuat bidang-bidang karir keolahragaan menjadi lebih terbuka untuk dimasuki oleh banyak pihak?

Dalam kasus lain, mari kita tengok kiprah KONI dan Top Organisasi keolahragaan kita. Karena merasa terbelenggu oleh mandat pengembangan olahraga prestasi, maka di mata mereka kewajiban satu-satunya dalam pembinaan adalah menyelenggarakan Pelatnas dan Pelatda, yang juga hanya melibatkan segelintir atlet. Kata kunci pemassalan dan pembibitan seolah-olah

hilang dari kamus kerja mereka.

Akibatnya, mereka merasa tidak wajib mengembangkan klub-klub olahraga untuk memperluas komunitas olahraganya. Mereka tidak merasa perlu menyusun dan mengembangkan sebuah sistem pengembangan (*developmental system*) agar masyarakat luas terlibat di dalamnya. Mereka hanya puas kalau keberadaan mereka di dalamnya tidak tergoyahkan. Oleh karena itu, semakin sedikit anggota komunitas olahraganya, semakin amanlah posisi mereka.

Mereka lupa, bahwa hanya komunitas besarlah yang mampu mendukung roh-hidup olahraganya. Mereka tidak sadar bahwa hanya komunitas yang seharusnya mereka binalah yang akan rela membayar tiket untuk menonton kompetisi yang digelarnya. Mereka juga abai dengan kenyataan bahwa komunitas besarlah yang akan menyediakan dana sumbangan yang memadai lewat iuran keanggotaan dan penjualan *merchandises*, termasuk berminatnya berbagai sponsor kepada olahraga mereka.

Tapi mereka memang pintar berkelit. Toh dana akan turun dari pemerintah (Pusat atau Daerah) menjelang SEA Games atau PON. Toh mereka bisa memilih menteri atau pengusaha konglomerasi untuk dijadikan ketua agar dana tetap tersedia. Toh, masih banyak para eks-jenderal yang aktivis yang pintar melobi pihak penguasa dana segar. Dsb.

Jika demikian dan tetap begitu cara pandang kita terhadap olahraga, maka kementerian pemuda dan olahraga akan disepelkan kehadirannya, karena jelas MENPORA tidak akan mampu memenuhi harapan mereka.

Lalu bagaimana seharusnya kita memandang kehadiran Menpora? Mudah-mudahan kesemuanya itu dipandang sebagai kewajiban pemerintah untuk lebih mendekatkan lagi manfaat olahraga bagi kepentingan masyarakat luas, bukan untuk kepentingan pemerintah itu sendiri.

Maksudnya, kehadiran Menpora mudah-mudahan dilihat sebagai upaya pemerintah untuk membantu meningkatkan kinerja pemerintah dalam kerangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendidik bangsa agar menjadi bangsa yang tangguh dan bermartabat, mendorong pertumbuhan ekonomi negara menjadi kekuatan yang diperhitungkan dunia, serta berbagai manfaat lain. Dengan demikian, sama seperti fungsi dari kementerian lain yang tentunya diarahkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan bangsa kita.

Karenanya, marilah kita sepakati bahwa cara pandang kita terhadap olahraga jangan disempitkan hanya pada olahraga prestasi. Tugas dan fungsi dari kementerian pemuda dan olahraga adalah upaya memberdayakan olahraga dalam dimensi luas; untuk kepentingan masyarakat, kepentingan pengembangan prestasi, pengembangan ekonomi rakyat melalui olahraga, pengembangan kualitas bangsa dengan menjadikan olahraga sebagai alat pendidikan, dan masih banyak lagi.

Dalam mekanisme kerjanya, tentu Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu dukungan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, justru kementerian olahraga perlu mendorong lahirnya institusi-institusi yang mampu mengakselerasi program pemberdayaan olahraga sesuai arah dan harapan yang diinginkan. Termasuk mempertahankan institusi yang sudah ada dengan lebih mengefektifkan fungsinya.\*\*\* (**Agus Mahendra: Dosen FPOK UPI di Bandung**)